



LKPJ

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

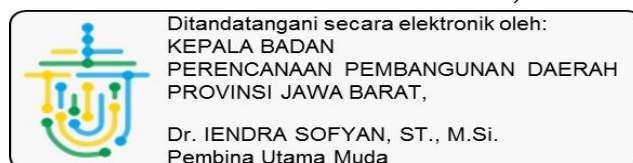
LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup LKPJ ini meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta penghargaan yang diraih pada Tahun 2024.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan telah berjalan secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini diraih melalui efisiensi dan efektivitas kinerja yang dilakukan serta koordinasi, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

Demikian Dokumen LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandung, 30 Desember 2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



DAFTAR ISI

KAT PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 LATAR BELAKANG	4
1.2 DASAR HUKUM	5
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	9
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT..	10
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	10
2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH..	12
2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	14
2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS	33
2.5 PENGHARGAAN	34
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024	37
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	42
BAB V PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH	10
TABEL 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
TABEL 2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	16
TABEL 2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024.....	33
TABEL 2.5 PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024.....	35
TABEL 3.1 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN ANGGARAN 2023	38
TABEL 4.1 ANGGARAN DAN REALISASI DEKON GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (GWPP) TAHUN 2024	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran

2024, kebijakan strategis yang diprakarsai serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan optimal. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan wujud efisiensi serta efektivitas kinerja seluruh komponen pemangku kepentingan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang tercermin dalam pencapaian target kinerja.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Veriflkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasiflkasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat: (9-95/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 12);
 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
 25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
 28. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 49);
dan
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 16).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 adalah untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 secara transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk mendukung pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama (IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah pada tujuan dan sasaran ke empat sebagaimana tercantum dalam RPD 2024-2026 yaitu “Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah. Adapun uraian capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A*	Indeks Reformasi Birokrasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kondisi Ini dapat dimaknai bahwa Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus bergerak maju secara signifikan dan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
					Provinsi Jawa Barat konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Keterangan: * realisasi 2023

Pencapaian indikator sasaran pada tujuan keempat RPD 2024-2026 yaitu “Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah”, salah satunya ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi yang tercatat pada kategori A dengan nilai 93,08 poin. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus bergerak maju secara signifikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh serta konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Kontribusi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi memiliki peran yang dominan terutama pada aspek area penguatan akuntabilitas. Hal ini didasari bahwa tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara langsung mendukung pencapaian target kinerja pada tujuan keempat RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 - 2026 adalah Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi dan Nilai komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi. Indikator tersebut merupakan parameter keberhasilan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Adapun uraian Indikator IKU Bappeda sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai Maksimal Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 30 poin dengan rincian: (Nilai Sub Komponen Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia) + (Nilai Sub Komponen Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)) + (Nilai Sub Komponen Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan)	Poin	25,90	26,32	Realisasi Indikator Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi telah tercapai
2.	Nilai komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	Nilai Maksimal Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 30 poin dengan rincian: (Nilai Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan x 6) + (Nilai Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi	Poin	26,59	27,05	Realisasi Indikator Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi telah tercapai

		kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan x 9) + (Nilai Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yg efektif & efisien x 15)				
--	--	---	--	--	--	--

Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, yaitu terealisasi sebesar 26,32 poin dari target sebesar 25,90 poin. Untuk komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi juga tercatat telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu tercapai sebesar 27,05 Poin dari target sebesar 26,59 Poin. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat.

Ketercapaian IKU Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatas, tidak terlepas dari hasil perumusan proses bisnis secara jelas dan terukur yang menggambarkan strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU di tahun 2024.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas

kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Melalui telaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 program, 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2024 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah adalah tetap melaksanakan kegiatan dan menghasilkan output sesuai target meskipun terdapat pengurangan alokasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2024 dari alokasi sebelum perubahan sebesar Rp. 83.261.801.797 menjadi sebesar Rp. 80.381.974.385 yang diterima oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	BB	AA	59.177.044.209	57.409.743.583			
					Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024		2. Persentase Belanja PDN Bappeda Jabar	Persen	90	90					
	1.1	1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	AA	AA	1.546.801.700	1.542.159.428			
		1.1.2				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	1.412.964.700	1.408.386.360			
		1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.810.000	12.802.000			

No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	12.810.000	12.801.500			
		1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	12.810.000	12.781.000			
		1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	12.810.000	12.807.900			
		1.1.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	48.785.000	48.769.810			
		1.1.8				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	33.812.000	33.810.858			
	1.2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	persen	97,5	97,59	40.257.700.030	39.038.132.099			
							2. Persentase TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	persen	100	100					
		1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	133	133	39.997.159.330	38.781.728.191			
		1.2.2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	14	7.620.000	7.620.000			

No			Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	20.816.000	20.656.000			
		1.2.6				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3	65.342.000	62.568.224			
		1.2.7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	165.518.200	164.315.184			
		1.2.8				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	1.244.500	1.244.500			
	1.3					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah yang Tertib	persen	100	100	76.354.350	70.625.000			
		1.3.1				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	13.369.399	13.224.000			
		1.3.2				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	31.367.224	28.097.500			
		1.3.5				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	31.617.727	29.303.500			
	1.5					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	poin	92,61	92,61	1.077.293.603	1.026.750.651			

No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.5.3				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	252.898.498	249.866.045			
		1.5.4				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	260.134.355	255.812.220			
		1.5.5				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	2	230.475.780	219.196.480			
		1.3.9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	50	288.478.400	260.123.906			
		1.5.10				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	200	200	45.306.570	41.752.000			
	1.6					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang terpenuhi	persen	100	100	5.770.778.670	5.648.537.327			
		1.6.1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	128.005.200	127.350.600			
		1.6.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	680.220.768	678.022.397			
		1.6.3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	239.532.800	237.528.283			
		1.6.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	624.362.800	623.398.150			

No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.6.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2	3.294.515.575	3.197.031.432			
		1.6.7				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	409.392.000	406.202.590			
		1.6.8				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2	146.996.387	141.740.990			
		1.6.10				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	247.753.140	237.262.885			
	1.7					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi	persen	100	100	2.395.138.179	2.222.224.750			
							2. Persentase dokumen pengadaan barang dan jasa yang berspesifikasi PDN	persen	90	90					
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	1	1.132.560.000	1.035.100.000			
		1.7.5				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	1	302.094.000	273.400.000			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang Disediakan	unit	139	139	960.484.179	913.724.750			

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/ut Rekomendasi DPRD	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.8					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, dan komunikasi terpenuhi	persen	100	100	6.269.332.137	6.080.038.680				
	1.8.2					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	1	1.127.616.283	1.047.160.489				
	1.8.3					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	241.380.000	241.172.400				
	1.8.4					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	4.900.335.854	4.791.705.791				
	1.9					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	1.783.645.540	1.781.275.648				
		1.9.2					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	90	90	1.170.602.500	1.170.566.020			
		1.9.6					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	100	100	289.795.040	288.316.650			
		1.9.10					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit	1	1	323.248.000	322.392.978			

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	poin	13,41	13,79	10.819.897.269	10.712.572.920			Pemerintah Provinsi Jawa Barat senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota baik melalui pertemuan formal ataupun informal untuk menyamakan persepsi di dalam perencanaan pembangunan, beberapa upaya yang telah dilaksanakan diantaranya Musrenbangnas, Rakortekrenbang, Pra Musrenbang, Musrenbang Provinsi, Forum Bappeda Se Jawa Barat dan Fasilitasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan.
							Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat	poin	11,37	11,37					
	2.1					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Provinsi	poin	7,93	8,74	7.015.133.800	6.958.024.152			
							Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi	persen	100	100					
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	persen	100	100					

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.1	2.1.1				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJPD/RKPD (jika RPJPD maka rancangan teknokratis)	Dokumen	2	2	804.679.100	798.130.572			
		2.1.2				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	54	54	462.619.900	457.243.421			
		2.1.3				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	1	635.065.000	634.265.000			
		2.1.4				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	27.745.800	27.718.690			
		2.1.5				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	1	1	2.246.238.000	2.229.411.467			
		2.1.6				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	2	2	2.838.786.000	2.811.255.002			
	2.2					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Provinsi yang sesuai Ketentuan	persen	100	100	1.539.429.589	1.511.903.313			
							Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai Ketentuan	persen	100	100					

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2.2.1					Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)	Dokumen	1	1	841.190.596	828.490.334			
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	orang	76	76	209.053.773	204.737.773			
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	54	54	223.587.720	218.817.274			
						Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku	1	1	265.597.500	259.857.932			
	2.3					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Perangkat Daerah Provinsi	poin	8,25	8,68	2.265.333.880	2.242.645.455			
							Persentase Dokumen Pengendalian dan Evlusi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Sesuai Ketentuan	persen	100	100					
	2.3.1					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	4	4	784.001.000	775.976.400			

No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjutr Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2.3.2				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	12	12	1.254.082.880	1.250.607.055			
		2.3.3				Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	laporan	4	4	227.250.000	216.062.000			
3						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	poin	13,52	13,85	10.385.032.907	10.321.399.135			
							2. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	poin	11,9	11,9					
							3. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	poin	13,26	13,76					
							4. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	poin	9,87	10,05					

No			Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5. Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	poin	13,24	13,65					
							6. Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	poin	11,95	11,95					
	3.1					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	7,85	8,71	3.306.939.954	3.291.162.191			
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai Ketentuan	persen	100	100					
							Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	poin	8,28	8,58					

No			Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persen	100	100					
		3.1.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	1.440.000.000	1.435.283.774			
		3.1.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	14	14	140.000.000	139.904.147			
		3.1.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	3	3	300.000.000	296.955.263			
		3.1.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	305.000.000	300.929.010			
		3.1.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan	Perangkat Daerah	8	8	140.000.000	139.935.478			

No			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia								
		3.1.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	laporan	5	5	981.939.954	978.154.519			
	3.2					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	poin	8,01	8,75	2.600.557.534	2.594.499.623			Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat tidak mengelola dana CSR, sesuai dengan prinsip yang tertera pada Perda No 2 Tahun 2013 bahwa pelaksanaan CSR dikelola oleh perusahaan serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol). Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat, sesuai dengan Pasal 9 (2): bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL. Tim fasilitasi CSR Jabar sebagai fasilitator tidak menerima dan mengelola aliran dana/anggaran CSR dari perusahaan, namun lebih kepada memberikan data-data terkait apa yang menjadi kebutuhan di Jawa Barat.
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	100	100					

No			Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	poin	8,04	8,84					
							Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Provinsi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persen	100	100					
		3.2.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	432.969.758	432.552.119			
		3.2.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	8	8	100.248.200	99.314.100			
		3.2.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	1.026.702.213	1.022.526.702			

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	579.838.786	579.325.813			
		3.2.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam	Perangkat Daerah	4	2	106.410.670	106.403.030			
		3.2.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	1	1	354.387.907	354.377.859			
	3.3					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	poin	8,12	8,83	4.477.535.419	4.435.737.321			
							Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persen	100	100					
							Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan	persen	100	100					

No			Urutan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pusat dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
							Nilai Kualitas Dokumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	poin	8,64	8,8					
		3.3.1				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Dokumen	1	1	434.437.615	431.474.577			
		3.3.3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	4	4	429.752.440	418.786.167			
		3.3.4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	laporan	1	1	787.056.620	781.634.660			
		3.3.5				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya	Dokumen	1	1	487.864.475	483.069.691			

No			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3.3.7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	2	2	379.913.050	375.695.122			
		3.3.8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	1	1.958.511.219	1.945.077.104			
Jumlah											80.381.974.385	78.443.715.638			

2.4 Kebijakan Strategis

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, pada tahun 2024 menginisiasi beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Adapun kebijakan strategis dimaksud diuraikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.
2	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
3	Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2024	Landasan untuk unsur penunjang urusan perencanaan dalam mendukung

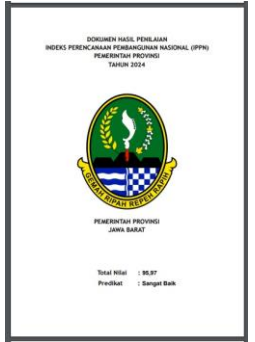
No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.	pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
4	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Penyesuaian Perencanaan Pembangunan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah yang adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan dan situasi terkini.
5	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Penyesuaian unsur penunjang urusan perencanaan untuk mengoptimalkan kinerja dengan mempertimbangkan perkembangan dan situasi terkini.

2.5 Penghargaan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta media, telah berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan. Berbagai prestasi telah ditorehkan Bappeda Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2024. Adapun penghargaan yang diraih sebagaimana dimaksud diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penghargaan yang diraih Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1	Terbaik 1 “Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 Tingkat Provinsi”	Kementerian PPN/ Bappenas	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jakarta 6 Mei 2024	 
2	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Kategori Urusan Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan RI	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Bandung 23 Agustus 2024	
3	CNN Indonesia Awards 2024 Kategori "Extraordinary Innovation in Smart Village Development Planning "	CNN Indonesia	Bappeda Provinsi Jawa Barat	17 September 2024	
4	Pemenang Terbaik Pertama Kategori Pemerintah Daerah Pada Indonesia's SDGs Action Awards 2024	Kementerian PPN/ Bappenas	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	7 Oktober 2024	

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
					
5	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kategori Sangat Baik	Kementerian PPN/Bappenas	Bappeda Provinsi Jawa Barat	26 November 2024	
6	Terbaik 1 SPM Award	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Jakarta 24 April 2024	
7	Penghargaan Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024	Komisi Informasi	Bappeda Provinsi Jawa Barat	14 Oktober 2024	

BAB III

TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2023 disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada hari Senin, 20 Maret 2024 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, yang kemudian dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) II LKPJ TA 2023. Pansus II LKPJ TA 2023 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembahasan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Penugasan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023.

Pembahasan Pansus II LKPJ TA 2023 dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat TA 2023. Berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Pansus II LKPJ, terdapat 7 (tujuh) rekomendasi yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat yang telah ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2024 maupun Tahun Anggaran 2025. Adapun tindaklanjut rekomendasi dimaksud diuraikan pada tabel 3.1.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya.

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun
Anggaran 2023

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan	Arahan Perencanaan dan Penganggaran	
				Perubahan 2023	Murni 2024
1.	Sektor perencanaan pembangunan daerah agar: A. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten dan pusat dalam hal perencanaan pembangunan supaya terintegrasi.	A. Pemerintah Provinsi Jawa Barat senantiasa berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota baik melalui pertemuan formal ataupun informal untuk menyamakan persepsi di dalam perencanaan pembangunan, beberapa upaya yang telah dilaksanakan	A. Terwujudnya konsistensi dan integrasi antara kebijakan pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota.		

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan	Arahan Perencanaan dan Penganggaran	
				Perubahan 2023	Murni 2024
	B. Mengelola dan mengalokasikan secara transparan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai dengan peraturan daerah tentang CSR.	diantaranya Musrenbangnas, Rakortekrenbang, Pra Musrenbang, Musrenbang Provinsi, Forum Bappeda Se Jawa Barat dan Fasilitasi terhadap penyusunan dokumen perencanaan baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan. B. Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat tidak mengelola dana CSR, sesuai dengan prinsip yang tertera pada Perda No 2 Tahun 2013 bahwa pelaksanaan CSR dikelola oleh perusahaan	B. Terwujudnya transparansi pengelolaan dana CSR dan meningkatnya sinkronisasi program-program Pembangunan		

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan	Arahan Perencanaan dan Penganggaran	
				Perubahan 2023	Murni 2024
		serta prinsip pendanaan rupiah sama dengan 0 (nol). Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat, sesuai dengan Pasal 9 (2): bertugas membantu Badan dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL dan PKBL. Tim fasilitasi CSR Jabar sebagai fasilitator tidak menerima dan mengelola aliran dana/anggaran CSR dari perusahaan, namun lebih kepada memberikan data-data terkait apa yang menjadi	Provinsi Jawa Barat dengan program-program CSR Perusahaan.		

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan	Arahan Perencanaan dan Penganggaran	
				Perubahan 2023	Murni 2024
		kebutuhan di Jawa Barat.			

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dekonsentrasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp277.952.000 dengan realisasi Rp277.224.503 (99,74%) dan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp217.744.000 dengan realisasi sebesar Rp214.874.000 (98,68%).

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Pemberi Dekon TP
1	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah	277.952.000	277.224.503	99,74	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	217.744.000	214.874.000	98,68	Kementerian PPN/Bappenas RI

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2024

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan kegiatan dekonsentrasi tidak lepas dari permasalahan/hambatan. Diantaranya adalah Surat Keputusan KPA yang terlambat terbit dikarenakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) belum turun dari pusat, dan adanya *refocusing*/pemotongan anggaran dari pusat. Solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian anggaran kegiatan dengan tetap memaksimalkan kinerja dan kualitas *output*.

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2024 tidak memberikan tugas pembantuan urusan pemerintahan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya (Kabupaten/Kota).

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2024 sudah selayaknya disyukuri. Keberhasilan diraih atas komitmen dan kolaborasi semua komponen pemangku kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Barat yang telah mendukung agenda-agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentunya masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan kinerja perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan, dengan harapan semoga kinerja perencanaan pembangunan daerah dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi masyarakat.



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**
PROVINSI JAWA BARAT